

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan Kebijakan Politik Mantan Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan maka peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan sudah sama-sama berjalan cukup baik dan optimal. Yang membedakan dimana kita diketahui bahwa masa kepemimpinan Alex Noerdin yang sudah menjabat dua periode maka sudah banyak program yang di buat dengan berbagai lembaga. Gubernur Alex Noerdin lebih berfokus pada pengendalian Karhutla dengan menyusun Peraturan Gubernur dalam pengendalian Karhutla. Kemudian saat kepemimpinan Gubernur Herman Deru langsung melanjutkan program yang telah di buat dengan kegiatan utama lebih berfokus membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla selanjutnya tinggal mengevaluasi program yang ada serta menambah dana dalam mengatasi Karhutla di Sumatera Selatan.
2. Tanggapan masyarakat mengenai Kebijakan Politik Gubernur Alex Noerdin dan Gubernur Herman Deru dalam upaya Penanggulangan

Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan memang sesuai dengan teori yang peneliti gunakan yaitu teori Kebijakan Politik yang dikemukakan oleh Robert D. Behn yaitu bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan bagaimana sikap dan peran pemerintah dengan lembaga serta hasil kebijakan yang sesuai dengan rencana kebijakan yang lebih menekankan proses yang akan dilakukannya. Dapat kita lihat dari apa saja upaya yang dilakukan dari kedua gubernur sudah berhasil dilakukan sesuai dengan koordinasi antar lembaga penanganan Karhutla. Hal itulah yang membuat masyarakat yakin bahwa pemerintah kedepannya dapat lebih baik lagi dalam hal penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan ini.

B. SARAN

Hasil penelitian diatas, saran-saran yang dapat peneliti berikan lewat penelitian antara lain:

1. Pemerintah diharapkan bisa mempertahankan penaggulangan karhutla yang sudah membaik serta diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi bencana karhutla. Serta meningkatkan peran legislatif dalam melakukan pengawasan, legislasi, dan bugdeting dalam tindakan pencegahan dan pengendalian karhutla di Sumatera Selatan.
2. Mengingat kebakaran hutan merupakan masalah lintas sektor dan terkait banyak aktor semestinya bukan hanya aktor pemerintah yang dilibatkan dalam Satgas pengendalian, namun juga masyarakat sipil, akademisi

maupun masyarakat serta pengusaha. Mekanisme koordinasi yang efektif masih perlu dikaji mulai dari pusat, provinsi hingga tingkat tapak (desa).

3. Perlunya perbaikan kualitas pelaporan kinerja bidang Karhutla serta sistem publikasinya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pengendalian Karhutla ditengah keterbatasan yang dimilikinya adalah dengan memberikan ruang bagi peran serta publik, misalnya untuk mendukung pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan Karhutla.
4. Skripsi ini memiliki keterbatasan baik materi ataupun tulisan, penulis sangat terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dari tulisan ini. Penulis mengharapkan penelitian dan kajian mengenai Kebijakan Politik harus dikembangkan dengan baik lagi, sebab sampai saat ini masih banyak hubungan atau kebijakan politik di Sumatera Selatan terus mengalami perkembangan baik mengenai konflik atau munculnya kebijakan baru serta pergantian masa kepemimpinan seorang Gubernur juga bisa mendasari perkembangan penelitian yang berbeda satu dengan lainnya.

